oleh pasal 5 ayat(1) Undang-undang No.22 tahun 1999 untuk dapat ditetapkan sebagai daerah otonom.

Pada tanggal 15 April 2000 di Kabupaten Bandung diselenggarakan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim peneliti PT. Penelitian ini mengacu pada persyaratan yang dituntut oleh pasal 5 Undang-undang No.22 tahun 1999. Semua aspek yang diteliti menunjukan bahwa cimahi memenuhi persyaratan untuk dijadikan daerah kota yang otonom.

Pada tanggal 8 Februari DPRD Provinsi Jawa Barat mengeluarkan SK persetujuan peningkatan status itu melalui SK No.135/Kep. DPRD.04/2001 tentang persetujuan peningkatan status kota administratif Cimahi menjadi Kota Cimahi.

Pada tanggal 28 Mei 2001 sidang pleno DPR RI mengesahkan UU No. 9/2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, dalam arti kota yang memiliki otonomi penuh dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang terlepas dari dominasi Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pada tahun 1975 Cimahi ditingkatkan menjadi kota administratif (PP no. 29 tahun 1975) diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, Cimahi merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom. Pembentukan Kota Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya, pada tanggal 18 Oktober 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui proses penelitian dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta, berdasarkan Undang-undang No. 9

Tahun 2001 tetang pembentukan Kota Cimahi.

Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, dimana pada saat itu Gubernur Jenderal Willem Deandeles membuat jalan dari Anyer ke Panarukan dan tepat di Alun-alun Kota Cimahi sekarang dibuat Loji (Pos Penjagaan).

Kemudian pada tahun 1874-1893 dilaksanakan pembuatan jalan Kereta Api Bandung-Cianjur dan di Cimahi dibuat Stasiun Kereta Api.Karena letaknya yang cukup strategis, maka pada tahun 1886 mulai dibangun Pusat-pusat Pendidikan Militer dan fasilitas lainnya seperti Rumah Sakit Dustira, Rumah Tahanan Militer dan lain-lain.

Pada tahun 1935 berdasarkan Staat Blad, tahun 1935 Cimahi ditetapkan sebagai Kecamatan dan kemudian pada tahun 1962 dari status Kecamatan yang diangkat menjadi Kewedanaan, meliputi 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1975 dari status kewadanaan ditingkatkan menjadi Kota Administratif. Tepatnya pada tanggal 29 Januari 1975 Cimahi menjadi Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Masyarakat dan beberapa LSM yang ada di Cimahi yang kemudian bergabung dalam Sekretariat Bersama Cimahi Otonom, berupaya memperjuangkan Cimahi menjadi Kota.

Akhirnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, tertanggal 17 Oktober 2001 Cimahi ditetapkan menjadi Kota, bersama dengan 11 Kota dan Kabupaten lainnya di Indonesia.

Dan pada tanggal 17 Oktober 2001 Cimahi diresmikan sebagai Kota Cimahi yang meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, terdiri dari 15 Kelurahan.

Sehari setelah Kota Cimahi diresmikan, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2001 Ir.H.M. Itoc Tochija, MM dilatik menjadi Pajabat Walikota oleh Menteri Dalam Negeri, dan berkewajiban untuk melaksanakan 11 Tugas, yaitu :

1. Penataan Kelembagaan dan Organisasi
2. Pengisian Personil dan Penataan Kepegawaian
3. Penyusunan Anggota DPRD
4. Penetapan Mekanisme dan Pengolahan Dana Perimbangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Penyelesaian utang piutang dan pinjaman daerah
6. Penyerahan fasilitas umum/sosial dan sarana/prasaranan perkotaan
7. Penyerahan barang milik/kekayaan Negara/daerah dari Kabupaten Induk ke Kota yang baru dibentuk
8. Inventarisasi dan penyerahan milik/kekayaan Negara/daerah/BUMN
9. Penyerahan dan pengelolaan arsip/dokumen dari Kabupaten Induk ke Kota yang baru dibentuk
10. Penentuan Tata Ruang
11. Penentuan batas wilayah Kota dan Kabupaten Induk.

Kemudian Ir.H.M. Itoc Tochija, MM terpilih menjadi Walikota pertama Kota Cimahi dan dilantik pada tanggal 18 Oktober 2002 sampai sekarang. Semenjak itulah Kota Cimahi mendirikan suatu kantor Pemerintahan yang termasuk di dalamnya Bagian Keuangan.

4.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan Pemerintah Kota Cimahi

Dalam menentukan tugas dan tanggung jawabnya, Walikota kemudian membentuk suatu perangkat pemerintahan yang akan membantunya, dan berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kota Cimahi yang disusun oleh Walikota Cimahi untuk seluruh divisi yang ada di Pemerintah Kota Cimahi, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 asisten daerah yaitu Asisten Pemerintah dan Kesehjateraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Program serta Asisten Administrasi dan Keuangan, yang dibantu oleh 8 bagian,
2. Sekretariat DPRD yang dibantu oleh 2 bagian,
3. Lembaga teknis daerah yaitu 4 bagian yang terdiri dari Bappeda (Badan Perencanaan Daerah), Bawasda (Badan Pengawas Daerah), BPMKP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana), Bakesbang (Badan Kesatuan Bangsa) serta 2 kantor yaitu Kantor Data, Informasi dan Komunikasi serta Kantor Kepegawaian Daerah,
4. Dinas Daerah terdiri dari 9 dinas yaitu: Dinas Tata kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, Dinas Perekonomian dan Koperasi dan Dinas Pendidikan,

5. Lembaga setingkat badan yaitu Rumah Sakit Umum Cibabat,
6. Lembaga setingkat kantor yaitu Satuan Polisi Pamong Praja,
7. Tiga (3) Kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan serta dibantu oleh 15 kelurahan.

Adapun uraian jabatan Pemerintahan Kota Cimahi pada Bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Bagian keuangan memiliki seorang Kepala Bagian dan terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Anggaran, dengan seorang Kepala Sub Bagian dan 5 orang staf,
2. Sub Bagian Perbendaharaan, dengan seorang Kepala Sub Bagian dan 12 orang staf,
3. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan dengan seorang Kepala Sub Bagian dan 9 orang Staf.

Untuk lebih jelasnya, penulis menyertakan bagan Bagian Keuangan dalam lampiran.

4.1.3 Aktivitas Pemerintah Kota Cimahi

Deskripsi tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Keuangan
    a. Memimpin, mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan bidang keuangan meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, belanja pegawai dan pembukuan;
    b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
    c. Membina dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
    d. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan bawahan;
    e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
    f. Merumuskan, mengkaji dan menetapkan SPD sebagai aspek yuridis yang berkenaan penyelenggaraan administrasi keuangan daerah sebagai bahan telaahan dan pertimbangan pimpinan;
    g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian penyusunan dan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan belanja pegawai;
    h. Menganalisa alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

i. Mengkaji, memaraf dan atau menandatangani naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Bagian Keuangan;
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Anggaran
   a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
   b. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
   c. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
   d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka perumusan dan penyusunan APBD;
   e. Melaksanakan pengelolaan administrasi SPD Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kota;
   f. Menyiapkan dan menyusun rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pengajuan dan atau penyediaan dana yang disampaikan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Pusat dalam kegiatan Tim Penyusunan Anggaran;
   g. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
   h. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bagian Anggaran;

i. Menyusun hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Anggaran;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan pengadministrasian perbendaharaan daerah;

b. Melaksanakan telaahan terhadap penyusunan *cash budget* dalam rangka penyediaan dan pengendalian keuangan daerah;

c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian serta memberikan rekomendasi atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) anggaran rutin dan pembangunan, baik beban tetap maupun beban sementara;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja rutin, belanja pegawai dan belanja pembangunan;

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengadministrasian perbendaharaan;

f. Mengatur dan menyelenggarakan layanan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan;

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
b. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan;
c. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
d. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan pembukuan administrasi penggunaan keuangan daerah;
e. Memeriksa dan meneliti tanda bukti pengeluaran meliputi bukti kwitansi dan bukti pendukung lainnya serta tata cara pengisiannya sebagai dasar keabsahan;
f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan dan atau atas perintah Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pemerintah Kota Cimahi juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi Pemerintah Kota Cimahi

" Dengan iman, taqwa, optimis dan cerdas jadikan Cimahi Kota maju, agamis, nyaman, tertib, aman dan produktif ".

b. Misi Pemerintah Kota Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi mempunyai misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana perekonomian dan lapangan kerja;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan penataan dan penegakan hukum;

4. Meningkatkan infrastruktur Kota;
5. Mengendalikan pembangunan agar berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha.

4.1.4 Karakteristik Responden Pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Cimahi

Data responden yang seharusnya dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 26 responden dari Pemerintah Kota Cimahi. Untuk mendapatkan data yang obyektif maka untuk variabel X yaitu quesioner diberikan kepada Bagian Keuangan untuk dijawab berdasarkan data yang ada di dalam Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan mengenai bagian keuangan yang bersangkutan. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

A. Profil responden untuk jenis kelamin Pria

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin Pria dapat dilihat dari pengakuan unsur laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan pada rekapituliasasi untuk jenis kelamin pria.

Tabel 4.1
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan untuk Pria

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	5	5%	25
Setuju	4	10	95%	40
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**15**	**100%**	**65**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2010

a) Untuk perhitungan Skor ideal =15x5x12=900

b)
$$\% = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$
$$= \frac{65}{75} \text{X } 100\%$$
$$= 86.67\%$$

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Bagian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada penjelasan pengakuan unsur laporan keuangan untuk jenis kelamin pria sudah sangat baik. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden dari jenis kelamin pria sebesar 86.67%.

Tabel 4.2
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan untuk Pria

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	15	95%	60
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**15**	**100%**	**60**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2010

a) Untuk perhitungan Skor ideal =15x5x12=900

b)
$$\% = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$
$$= \frac{60}{75} \text{X } 100\%$$
$$= 80\%$$

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Bagian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada penjelasan kriteria unsur laporan keuangan untuk jenis kelamin pria sudah sangat baik. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden dari jenis kelamin pria sebesar 80%.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan untuk Pria

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Cimahi	65	75	86.67%	Sangat Baik
2	Karakteristik kualitatif laporan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi	60	75	80%	Baik
	Total	125	150	83,34%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{125}{150} \text{X } 100\%$$

$$= 83.34\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden pada jenis kelamin pria maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kenijakan akunatnsi terhadap kualitas hasil laporan keuangan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 83.34%.

B. Data responden untuk jenis kelamin Wanita

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin wanita dapat dilihat dari pengakuan unsur laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan pada rekapituliasasi untuk jenis kelamin pria.

Tabel 4.4
Pengakuan Unsur Laporan Keuangan untuk Wanita

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	11	100%	44
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**11**	**100%**	**44**

a) Untuk perhitungan Skor ideal =11x5x10=550

b) $$\% = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{44}{55} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Bagian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada penjelasan pengakuan unsur laporan keuangan untuk jenis kelamin wanita sudah sangat baik. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden dari jenis kelamin pria sebesar 80%.

Tabel 4.5
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	2	2%	10
Setuju	4	9	98%	36
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**11**	**100%**	**46**

a) Untuk perhitungan Skor ideal =11x5x10=550

b) $$\% = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{46}{55} \text{X } 100\%$$

$$= 83.67\%$$

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa Bagian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada penjelasan pengakuan unsur laporan keuangan untuk jenis kelamin wanita sudah sangat baik. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden dari jenis kelamin wanita sebesar 83.67%.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan Untuk Wanita

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengakuan Unsur Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Cimahi	44	55	80%	Baik
2	Karakteristik kualitatif laporan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi	46	55	83.67%	Baik
	Total	90	110	81,82%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{90}{110} \text{X } 100\%$$

$$= 81.82\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden pada jenis kelamin wanita maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi terhadap kualitas hasil laporan keuangan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 81.82%

2. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.7
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
1.	SMP atau sederajat	0	0%
2.	SMA atau sederajat	7	26.92%
3.	Strata 1 (S1)	19	73.08%
Σ	**Jumlah**	**26**	**100%**

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2010

1. $$\% \text{ SMA atau sederajat} = \frac{\text{Frekuensi}}{\text{Jumlah}} \text{X } 100\%$$

$$\% \text{ SMA atau sederajat} = \frac{7}{26} \text{ X } 100\%$$

$$= 26.92\%$$

$$2.\ \%\ \text{Strata 1 (S1)} = \frac{\text{Frekuensi}}{\text{Jumlah}} \times 100\%$$

$$\%\ \text{Strata 1 (S1)} = \frac{19}{26} \times 100\%$$

$$= 73.08\%$$

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 73.08% , dan responden dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 26.92%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).

4.2 Pembahasan

Pada point ini penulis akan membahas mengenai analisis penerapan peraturan walikota cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi pemeintah daerah kota cimahi dan kualitas hasil laporan keuangan pada Pemerintah Kota Cimahi.

Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 22 pertanyaan dengan perincian 12 pertanyaan mengenai kebijakan akuntansi pada pengakuan unsur laporan keuangan dan 10 pertanyaan tentang kualitas hasil laporan keuangan pada karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Jumlah responden dalam penelitian ini 26 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh staff bagian keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner.

4.2.1 Analisis Penerapan Pemerintah Pada Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian kuesioner dari no.1 s.d 12 atas jawaban responden yang diisi oleh 26 orang responden yang merupakan staff Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :

a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.8
Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1	**20.00% – 36.00%**	Tidak Baik
2	**36.01% – 52.00%**	Kurang Baik
3	**52.01% – 68.00%**	Cukup
4	**68.01% – 84.00%**	Baik
5	**84.01% – 100%**	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati, 2007:85

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan dari 26 orang pada bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang menjadi responden tentang penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebanyak 12 butir pertanyaan mengenai Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang diajukan kepada responden.

Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pengakuan unsur laporan keuangan berdasarkan indikator:

1. Kemungkinan besar ekonomi masa depan terjadi

Konsep kamungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Berikut gambaran tanggapan 26 pengakuan unsur laporan keuangan :

Tabel 4.9

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	26	100%	130
Setuju	4	0	0.00%	0
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**130**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{130}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Pada umumnya responden sependapat bahwa bagian akuntansi pada pengakuan unsur laporan keuangan pada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi pada penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Persentase skor tanggapan responden sebesar 100% termasuk dalam kategori yang sangat baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan pada Pemerintah daerah Kota Cimahi sudah memahami tentang pengakuan unsur laporan keuangan pada kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi.

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pos atau Kejadian akan Mengalir dari atau Ke entitas pelaporan pada manfaat ekonomi masa depan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Sebagian besar responden sependapat bahwa bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada entitas pelaporan keuangannya pada manfaat ekonomi masa depan terjadi pos atau kejadian peristiwa akan mengalir ke entitas pelaporan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan bahwa pos atau kejadian/peristiwa akan selalu mengalir dari atau ke entitas pelaporan manfaat ekonomi masa depan terjadi.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.6.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Kemungkinan Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan	130	130	100%	Sangat Baik
2	Mempertahankan Kepercayaan Pemberi Tugas	104	130	80%	Baik
	Total	234	260	90%	Sangat Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{234}{260} \text{X } 100\%$$

$$= 90\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Kemungkinan Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi sudah sangat baik yaitu dengan hasil sebesar 90%.

2. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Biaya dan Estimasi Pada pengakuan transaksi pada CaLK

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada biaya dan estimasi pada pengakuan transaksi pada calk sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pos Atau Peristiwa Dapat Terjadi Pada Keandalan Pengukuran

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada pos atau peristiwa dapat terjadi pada keandalan pengukuran sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.14

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Keandalan Pengukuran

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Mempertahankan Kepercayaan Pemberi Tugas	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

208

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{}{260} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator keandalan pengukuran sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

3. Pengakuan Aset

Pada pengakuan aset tetap ini untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berarti bahwa aset tersebut masa manfaatnya jangka panjang;
b) Biaya perolehan aset minimal Rp.300.000,- perunit, dan dapat diukur secara andal, yang maksudnya untuk kapitalisasi peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya;
c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, pengertian digunakan adalah bahwa aset tersebut digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, yang bermakna bahwa suatu aset tetap dapat diakui jika sudah terdapat bukti yang andal. Untuk aset yang dibeli pengakuannya pada saat aset tersebut diserahkan dan diterima bukti kepemilikannya.

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Aset Diakui Pada Saat Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Penerimaan Kas Oleh Pemerintah Kota Cimahi

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	0
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mendaptakan pengakuan akuntansi membutuhkan pengaturan yang lebih rinci, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Aset Pemerintah Kota Cimahi

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor**
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\ \%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pada aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dan pengakuan peneriman kas oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk mendaptakan pengakuan akuntansi membutuhkan pengaturan yang lebih rinci, aset akan sesuai jika telah terjadi dan manfaat ekonominya yng mungkin dipandang untuk diperoleh Pemerintah Kota Cimahi setelah periode akuntansi berjalan, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80 % termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Keandalan Pengukuran

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Kemungkinan Besar Masa Ekonomi Terjadi pada Penyusunan Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Mempertahankan Kepercayaan Pemberi Tugas	104	130	80%	Baik
3	Pengakuan Aset Pemerintah Kota Cimahi	104	130	80%	Baik
	Total	312	390	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{312}{390} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan aset sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%

Perpindahan penguasaan aset bermakna pemindahan kepemilikan dan bukan pemindahan pengelolaan saja. Harus sesuai dengan peraturan perundangan yang menyangkut barang milik negara (BMN)/BMD dan Peraturan Daerah yang mengatur barang milik daerah (BMD). Perpindahan penguasaan aset bisa terjadi dalam kasus :

a) Perpindahan penguasaan aset antar entitas akuntansi/pelaporan didalam satu Pemerintah Daerah.

   Dengan contoh kasus sebagai berikut :

   Pemerintah Kota Cimahi membeli truk sampah melalui DPA Dinas PLK. Kemudian pengelolaan aset diserahkan kepada SKPD Kecamatan, maka penguasaan aset berpindah dari Dinas PLK SKPD Kecamatan dikuatkan dengan berita acara pemindahan pengelolaan (penguasaan).

   Tabel 4.19 Jurnal Pengakuan Aset yaitu :

Tabel 4.19
Jurnal Pengakuan Aset (dalam 000.000)

No.	Tgl.	Keterangan	Reff	Debet	Kredit
1. a.	02/04/20X0	SKPD Dinas PLK Mencatat perolehan aset tetap : Belanja modal –Truk RK-PPKD Aktiva tetap-Truk Edi-diinvestasi pada aktiva tetap		 Rp.200 Rp.200	 Rp.200 Rp.200
b.		Mencatat penyerahan aktiva tetap – truk ke SPKD Kecamatan : Edi-diinvestasi pada aktiva tetap Aktiva tetap-Truk (Penyerahan ini disertai dengan penjelasan di CaLK)		 Rp.200	 Rp.200
2. a. b.	02/04/20X0	SKPD-Kecamatan Mencatat belanja modal : No Entry (karena menggunakan DPA Dinas PLK) Mencatat aktiva tetap- truk dari SKPD Dinas PLK : Aktiva tetap-truk Edi-diinvestasikan pada aktiva tetap (penerimaan ini disertai dengan penjelasan pada CaLK)		 Rp.200	 Rp.200
3. a. b.	02/04/20X0	PPKD Mencatat perolehan aset tetap di Dinas PLK : RK-SKPD Dinas Kebersihan Kas di Kasda Mencatat pengakuan aktiva tetap No Entry		 Rp.200	 Rp.200

Sumber:Modul teknis akuntansi dan ilustrasi penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah daerah Kota Cimahi, Hal KA09-57 s.d KA09-59

4. Pengakuan Kewajiban

Pengakuan diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Penerimaan Kas Oleh Pemerintah Kota Cimahi

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan kewajiban sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Pengakuan Kewajiban

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengakuan kewajiban pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul	104	130	80%	Baik
	Total	104	130	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{104}{130} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan kewajiban sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

Dibawah ini adalah contoh kasus dari pengakuan kewajiban, yaitu :

Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman pada umumnya berjangka panjang, artinya periode pengembaliannya lebih dari 12 bulan. Sebagai contoh Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tanggal 20 Februari 20X0 menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp.1 Milyar yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjaman No.123/DDDD/08/2006.

Tabel 4.22 Jurnal Pengakuan Kewajiban yaitu :

Tabel 4.22
Jurnal Pengakuan Kewajiban (dalam 000.000)

No.	Tgl.	Keterangan	Reff	Debet	Kredit
1.	20/02/20X0	SKPD Mencatat pengakuan kewajiban : No Entry			
2. a. b.	20/02/20X0	PPKD Mencatat mencatat pengakuan penerimaan pembiayaan dari pinjaman jangka panjang : Kas di Kasda Penerimaan pembiayaan-hutang jangka panjang Mencatat pengakuan utang jangka panjang : EDI-dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka panjang Utang jangka panjang (penerimaan ini disertai dengan penjelasan pada CaLK)		 Rp.1.000 Rp.1.000	 Rp.1.000 Rp.1.000

Sumber : Modul teknis akuntansi dan ilustrasi penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi

5. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah untuk seluruh transaksi PPKD, maksudnya pengakuan pendapatan dengan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah ekuitas dana lancar. Pendapatan di PPKD diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah.

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan pendapatan sudah sesuai pada saat rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan pendapatannya diakui dan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Timbulnya Hak Atas Pengakuan Pendapatan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan pendapatan sudah sesuai pada saat timbulnya hak atas pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.25.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Pengakuan Pendapatan

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan	104	130	80%	Baik
2	Timbulnya Hak Atas Pengakuan Pendapatan	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{260} \text{X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan pendapatan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

Pendapatan di PPKD diakui pada saat diterima direkening kas umum daerah. Pada pengakuan pendapatan terdapat contoh kasus yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Januari 20X0 Pemerintah Kota Cimahi menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp 500.000.000,-

Tabel 4.26 Jurnal Pengakuan Pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26
Jurnal Pengakuan Pendapatan (Dalam 000.000)

No.	Tgl.	Keterangan	Reff	Debet	Kredit
1.	20/01/20X0	SKPD Mencatat pengakuan kewajiban : No Entry			
2.	20/01/20X0	PPKD Kas di Kasda Pendapatan dana bagi hasil pajak		Rp.500	 Rp.500

Sumber : Modul teknis akuntansi dan ilustrasi penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Cimahi, Hal KA06-5.

6. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umu daerah atau entitas pelaporan khusus pengeluaran mengenai bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Tabel 4.27
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Terjadi Pengeluaran Di Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor**
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan belanja terjadi pengeluaran di rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80%termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.28
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengakuan Belanja Mempunyai Fungsi Perbendaharaan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa pengakuan Mempunyai Fungsi Perbendaharaan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel berikut:

Tabel 4.29
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Pengakuan Belanja

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Terjadi Pengeluaran Di Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan	104	130	80%	Baik
2	Pengakuan Belanja Mempunyai Fungsi Perbendaharaan	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{300} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengakuan belanja sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Berikut adalah contoh kasus dari pengakuan belanja yang terjadi di PPKD :

Tanggal 8 Mei 20X0 PPKD melakukan pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp.90.000.000 denga menggunakan SP2D-LS. Tabel 4.25 Jurnal Pengakuan Belanja yaitu :

Tabel 4.30
Jurnal Pengakuan Belanja (Dalam 000.000)

No.	Tgl.	Keterangan	Reff	Debet	Kredit
1.		SKPD Transaksi ini tidak ada di SKPD			
2.	08/05/20X0	PPKD Belanja bantuan keuangan Kas Di Kasda		Rp.90	 Rp.90

Sumber : Modul teknis akuntansi dan ilustrasi penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Cimahi, Hal KA07-8

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel 4.26

Tabel 4.31
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi	234	260	90%	Sangat Baik
2	Keandalan penggukuran	208	260	80%	Baik
3	Pengakuan aset	312	390	80%	Baik
4	Pengakuan kewajiban	104	130	80%	Baik
5	Pengakuan pendapatan	208	260	80%	Baik
6	Pengakuan belanja	208	260	80%	Baik
	Total	1274	1560	81.67%	**Baik**

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi. Artinya penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah tinggi. Berasarkan hasil kuesioner yang telah penulis buat untuk bagian keuangan Pemerintah Kota Cimahi, sehingga penulispun dapat membuat kesimpulan bahwa pada Penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Hasil Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi, pada pengakuan unsur laporan keuangan yang didalamnya berisi kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi, keandalan pengukuran, pengakuan aset, pengakuan kewajiban, pengakuan pendapatan, dan pengakuan belanja sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pada Peraturan Walikota Cimahi no.11 tahun 2009 tentang kebijakan

akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi mempunyai kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai berikut :

a. Kelebihan dari Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah Kota Cimahi yaitu setiap pos neraca sudah mempunyai standar yang tetap.
b. Kekurangan dari Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah Kota Cimahi yaitu :
    a) aset yang dibawah nilai kapitalisasi belum dikelompokkan pada pos neraca,
    b) belum membahas secara rinci biaya-biaya perolehan aset tetap selain biaya modalnya seperti biaya pasang, biaya angkut, dan lain-lain,
    c) depresiasi aktiva tetap belum dilaksanakan,belum memiliki kebijakan tentang layanan umum daerah.Kebijakan akuntansi termasuk kepada pemerintah daerah dan merupakan salah satu sumber untuk mempermudah dalam laporan keuangan guna memperbaiki laporan keuangan yang masih belum sesuai dengan peraturan walikota dan peraturan pemerintah. Untuk mengetahui seberapa penting peraturan walikota cimahi tentang kebijakan akuntansi yang sudah diterapkan dalam Pemerintah Kota Cimahi.

4.2.2 Analisis Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Pada bagian ini akan diuraikan data kuesioner no.13 s.d 22 dan tanggapan 26 orang pada bagian keuangan yang menjadi responden tentang kualitas hasil laporan keuangan, pada kualitas hasil laporan keuangan berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi, kualitas laporan keuangannya mempunyai karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sama halnya dengan penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal.

1. Relevan

Kualitas hasil laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan jika informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa yang akan datang dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu.

Tabel 4.32
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Informasi Yang Termuat Dapat Mempengaruhi Keputusan Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah relevan karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, oleh karena itu kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.33
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Informasi Laporan Keuangan Yang Relevan Sudah Sesuai Dengan Penggunaannya

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor**
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah relevan karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya, oleh karena itu kualitas hasil laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan Akuntansi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.34
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Masih Terjadi Kekeliruan Dalam Pengguna Informasi Yang Relevan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{150} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas responden sependapat bahwa kekeliruan dalam pengguna informasi yang relevan tersebut dapat dicegah apabila kekeliruan tersebut masih terjadi, dan menurut hasil kuesionernya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang

kebijakan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran ketaatan pada kode etik secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.35.

Tabel 4.35
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Relevan

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Informasi Yang Termuat Dapat Mempengaruhi Keputusan Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Informasi Laporan Keuangan Yang Relevan Sudah Sesuai Dengan Penggunaannya	104	130	80%	Baik
3	Masih Terjadi Kekeliruan Dalam Pengguna Informasi Yang Relevan	104	130	80%	Baik
	Total	312	390	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{312}{390} \times 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator relevan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengerian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Tetapi jika hakikat atu penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguana informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Tabel 4.36
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengertian Yang Menyesatkan dan Kesalahan Material Pada Laporan Keuangan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Hampir keseluruhan responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah relevan karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.37
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Jujur Untuk Disajikan

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Hampir keseluruhan responden sependapat bahwa suatu laporan keuangan sudah menyajikan dengan jujur untuk disajikan. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Tabel 4.38
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Informasi Yang Diarahkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Umum

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pada pihak tertentu sudah tidak merugikan pihak lain, berarti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah andal, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang andal secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.39.

Tabel 4.39
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Andal

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengertian Yang Menyesatkan dan Kesalahan Material Pada Laporan Keuangan	104	130	80%	Baik
2	Menyajikan Laporan Keuangan Dengan Jujur Untuk Disajikan	104	130	80%	Baik
3	Informasi Yang Diarahkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Umum	104	130	80%	Baik
	Total	312	390	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{312}{390} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator andal sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%**.**

3. Dapat Dipahami

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Tabel 4.40
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pengguna Laporan Yang Mengasumsikan memiliki Pengetahuan Yang Memadai

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa pada Pemerintah Kota Cimahi pada pengguna laporan telah mengasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat dipahami, berarti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dipahami karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.41
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Yang Dapat Dipahami

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor**
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa pengguna laporan keuangan mempunyai kemampuan untuk mempelajari informasi pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat dipahami yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cimahi No.11 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi dan sudah tidak merugikan pihak lain, berarti laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah dapat dipahami. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran indikator dapat dipahami pada karakteristik kualitatif laporan keuangan secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.42.

Tabel 4.42
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Dapat Dipahami

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengguna Laporan Yang Mengasumsikan memiliki Pengetahuan Yang Memadai	104	130	80%	Baik
2	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Yang Dapat Dipahami	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{208}{260} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden pada kuesioner no. 21-22 maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator dapat dipahami pada karakteristik kualitatif laporan keuangan sudah baik yaitu dengan hasil sebesar 80%

4. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahamannpara pengguan laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Tabel 4.43
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Laporan Keuangan Yang dapat Dibandingkan Dengan Pemerintah Daerah Lain

Respon	Bobot	F	%	∑ skor
Sangat setuju	5	26	100%	130
Setuju	4	0	0.00%	0
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**130**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{130}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 100\ \%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah dapat dibandingkan dengan pemerintah daerah lain, berarti alporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Cimahi. Persentase skor tanggapan responden sebesar 100 % termasuk dalam kategori sangat baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Tabel 4.44
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi

Respon	**Bobot**	**F**	**%**	**∑ skor**
Sangat setuju	5	0	0.00%	
Setuju	4	26	100%	104
Netral	3	0	0.00%	0
Tidak setuju	2	0	0.00%	0
Sangat tidak setuju	1	0	0.00%	0
Total		**26**	**100%**	**104**

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \text{ X } 100\%$$

$$\% \text{ Skor tanggapan} = \frac{104}{130} \text{ X } 100\%$$

$$= 80\%$$

Mayoritas keseluruhan responden sependapat bahwa dalam menerapkan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan kebijakan akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah

dapat dipahami karena informasi yang termuat dapat mempengaruhi keputusan laporan keuangan, dan pada laporan keuangannya sudah sesui dengan penggunaannya. Persentase skor tanggapan responden sebesar 80% termasuk dalam kategori baik, mencerminkan bahwa pada umumnya bagian keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi peraturan tersebut sudah diterapkan pada bagian keuangan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran indikator dapat dipahami pada karakteristik kualitatif laporan keuangan secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden pada tabel 4.45.

Tabel 4.45
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Indikator Dapat Dibandingkan

No	Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% skor aktual	Kriteria
1	Pengguna Laporan Yang Mengasumsikan memiliki Pengetahuan Yang Memadai	104	130	80%	Baik
2	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Yang Dapat Dipahami	104	130	80%	Baik
	Total	208	260	80%	Baik

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran auditor internal bersertifikasi Qualified Internal Auditor secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.46
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Kualitas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Relevan	312	390	80%	Baik
2	Andal	312	390	80%	Baik
3	Dapat Dipahami	208	260	80%	Baik
4	Dapat Dibandingkan	208	260	80%	Baik
	Total	1040	1300	80%	**Baik**

Kualitas hasil Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Cimahi No.11 Tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi.

Kualitas hasil laporan keuangan yaitu laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah lain. Dari hasil kuesioner ini bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah menerapkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi.

Pada kualitas hasil laporan keuangan yaitu laporan keuangan Pemerintah Kota Cimahi sudah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah lain. Dari hasil kuesioner ini bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah menerapkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Walikota Cimahi. Untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.